

Model Pengembangan Ekonomi Kota Malang

Sodik

Universitas Widyagama Malang

Mukhlis Mas'ud

Universitas Widyagama Malang

Indah Dewi Nurhayati

Universitas Widyagama Malang

Abstract: *The research aims at: (1) providing the guideline for the implementation of Economic Development Model for Malang City; (2) identifying economic potential and its relation with economic development for Malang City; (3) examining the development potential based on strategy and priority considering the economic potential of Malang City; and (4) formulating economic development model for Malang City. Taking account the results of research, it may conclude that Economic Development Model for Malang City has a potential sector. Results of input-output analysis, through forward and backward linkage, indicate that the economic activity of Malang City remains at Quadrant II involving such production activities as: metal-based goods industry, rice, other plantation-based crop, corn, truck, sugarcane, fossil oil, natural gas, trade, poultry, telecommunication, mining, upland fishery, private service and household service.*

Keywords: *Economic Development Model, Input-Output Analysis, and Forward and Backward Linkage*

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001, telah memberikan kesempatan kepada setiap daerah propinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia untuk mengembangkan sendiri potensi daerah (*endowment factor*) yang dimilikinya. Selama ini pengembangan potensi daerah telah diarahkan pada 9 sektor ekonomi, yaitu: Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri, Bangunan, Angkutan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Lembaga Keuangan dan Jasa Perbankan, serta Jasa-Jasa.

Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh masing-masing sektor tidaklah sama. Perbedaan itu terlihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan pertumbuhan yang berbeda itu mempengaruhi kesejahteraan ekonomi secara agregat

di daerah yang kini melaksanakan otonomi daerah.

Kegiatan ekonomi yang hanya mengandalkan pada suatu sektor tertentu merupakan ciri dari perekonomian pasar yang diperankan oleh pihak swasta yang bersifat jangka pendek dan homogen. Sifat homogen itu juga nampak pada alokasi sumberdaya ekonomi, terutama sumberdaya manusia.

Di era otonomi, pembangunan ekonomi haruslah dilakukan secara serentak pada setiap sektor, walaupun menurut Hirschman dalam Todaro (1989), bahwa untuk negara (daerah) berkembang pembangunan ekonomi tidak dilakukan secara serentak (*unbalanced growth*) yaitu dengan menetapkan sektor unggulan, dimana sektor unggulan ini akan berimplikasi ke depan (*forward linkages*) dan hubungan ke belakang (*backward linkages*).

Pemerintah harus memberikan kejelasan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi yang akan dicapai sesuai dengan kehendak masyarakat daerah, karena masyarakat itu sendirilah yang lebih mengeta-

Alamat Korespondensi:

M. Sodik, Mukhlis Mas'ud, Indah Dewi Nurhayati,
Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang
Jl. Borobudur 35 Malang
Tlp. (0341) 492282

hui sektor ekonomi mana yang perlu ditingkatkan, dikembangkan, dipertahankan, sesuai dengan sosio-kultur daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan dari atas ke bawah (*top-down planning*) yang pernah dilakukan pada masa orde baru, nampaknya belum menciptakan kestabilan ekonomi di daerah, bahkan yang terjadi adalah ketidakjelasan seperti alokasi sumberdaya (modal), ketidakmerataan pendapatan, pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*) merupakan perencanaan yang diharapkan dapat mengatasi distorsi tersebut. Menurut Cullis dan Jones (1992), bahwa pemerintah suatu daerah bukan hanya berperan dalam hal keuangan (anggaran), tetapi juga berperan dalam hal penentuan pilihan supaya masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan.

Oleh karena itu desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat daerah untuk berkembang secara mandiri karena itulah diperlukan perubahan sikap dari yang sebelumnya pasif menunggu komando dan pemerintah pusat menjadi pemerintah yang berinisiatif dan inovatif. Oleh karena itu paradigma baru dalam melaksanakan otonomi daerah adalah bagaimana mewujudkan *good governance* dengan mengadakan reformasi di bidang perencanaan pembangunan agar pembangunan ekonomi di daerah lebih berkembang, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.

Disisi lain dalam usaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi di daerah, adalah tidak mungkin perekonomian sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, tetapi diperlukan adanya peranan pemerintah dalam hal mengatur ekonomi. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur perekonomian daerah otonomi adalah dengan menerapkan desentralisasi fiskal. Kebijakan fiskal ini di-

harapkan mampu meningkatkan efisiensi perekonomian daerah terutama dalam hal alokasi dan distribusi. Efisiensi ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan nilai dalam ukuran uang dari pengeluaran pemerintah yang diterima oleh pembayar pajak, sedangkan nilai outputnya bertambah besar atas pemanfaatan sejumlah sumberdaya tersebut. Menurut Adam Smith (Musgrave, R. A., P.B. Musgrave, 1989), bahwa penyelenggaraan pajak harus didasarkan pada unsur keadilan, kepastian, keselarasan, dan efisiensi (pertumbuhan). Oleh karena itu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumberdaya (peranan fiskal) dapat diarahkan untuk menghasilkan.

Ketika Perekonomian Indonesia telah mengalami pasang surut. Pertumbuhan yang tinggi antara 6-7% pernah dialami pada dua dekade yang lalu, yaitu antara tahun 1970-1990; dan kemudian mulai menurun antara 5-6%. Antiklimaknya ketika terjadi Krisis Moneter pada tahun 1997-1998 dengan tingkat pertumbuhan -13% (minus). Sekarang perekonomian Indonesia sedang merangkak menuju proses pemulihan dengan tingkat pertumbuhan 3-4%. Dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam Rapat Paripurna DPR 16 Agustus 2005 disampaikan bahwa sekarang perekonomian Indonesia sedang merangkak menuju proses pemulihan, tahun 2004 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% sementara di tahun 2005 tingkat pertumbuhan sebesar 5,9% pada semester pertama dan keyakinan akan mencapai 6,2 % di tahun 2006 didasarkan pada perkembangan ekonomi yang sedikit membaik dari tahun sebelumnya (*Kompas*, 19/8/2005).

Diakui akibat krisis dan tingkat pertumbuhan yang sangat lambat tersebut, terjadi ledakan pengangguran hingga 40 juta (sekitar 25% total penduduk) dan menurunnya tingkat kesejahteraan. Hal itu tentunya mengakibatkan jumlah penduduk miskin

terus meningkat di tahun 2000 yang mencapai sekitar 47 juta penduduk dan tahun 2004 ini pengangguran telah mencapai 60 juta (ADB). Krisis ekonomi yang dialami Indonesia semakin membangkitkan kesadaran akan peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai “tulang punggung” perekonomian Indonesia.

Peran UKM sangat signifikan dalam mendorong laju akselerasi pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki pola pertumbuhan ekonomi, meskipun ada fakta terdapatnya ketidakseimbangan antara kontribusi UKM dalam penyediaan lapangan kerja dengan kontribusi dalam pembentukan nilai tambah. Ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Menurut BPS, besaran PDB yang diciptakan UKM pada 2003 mencapai Rp1.013,5 triliun (56,7% dari total PDB Nasional). Sementara tenaga kerja yang terserap sektor UKM pada 2003 tercatat 79 juta pekerja, lebih tinggi 8,6 juta pekerja dibanding tahun sebelumnya dengan 70,4 juta pekerja, atau selama 2000-2003 meningkat 12,2% seiring pertumbuhan UKM, menjadi 42,4 juta unit pada 2003

Adanya perubahan sistem pemerintahan, dari Dekonsentrasi dengan kontrol dominan dari Pusat menjadi Desentralisasi ke daerah dan kabupaten (UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah) yang kemudian di amandemen menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004, maka pemulihan ekonomi (*economic recovery*), khususnya dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan memerangi kemiskinan, sudah barang tentu lebih mengandalkan peran daerah. Dan menjadi relevan untuk memikirkan bagaimana pengembangan ekonomi di daerah (*Local Economic Development*) di tingkat Kota dan Kabupaten.

Berangkat dari kebijakan umum tentang pengembangan ekonomi Kota Malang selain dicanangkan sebagai kota pendidikan, juga diarahkan untuk pengembangan Malang sebagai kota perdagangan dan jasa. Mengingat sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian (35.9%) serta dengan tingkat tertinggi (6.5%). Walaupun demikian ternyata Pemerintah Kota Malang tetap mempertahankan keberadaan sentra-sentra industri kecil yang menjadi tulang punggung masyarakat kecil dengan segala keterbatasannya. Sentra-sentra industri dan pedagang kaki lima (PKL) itu antara lain: Sentra makanan, tempe kedelai, pakaian jadi, anyaman, pabrik rokok, keramik dan lain-lain.

Program pengembangan ekonomi lokal di tiap daerah umumnya dimulai dari tahap perencanaan yang dikoordinir oleh Bappeda/Bapeko setempat. Pola perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dengan menggunakan metode jejaring aspirasi partisipatif masyarakat melalui pola standar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimana sektor-sektor industri kecil dan rumah tangga, sentra ekonomi lokal masih mendapat perhatian.

Beberapa program yang dibuat Pemerintah Kota Malang misalnya dicoba untuk bertujuan pada penciptaan iklim usaha yang kondusif. Terdapat tiga tujuan besar yang ingin dicapai untuk mendukung pengembangan sebagai kota perdagangan dan jasa yaitu: (1) terciptanya iklim interaksi positif antara Pemkot Malang dengan pelaku ekonomi; (2) menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal, masuknya arus investasi dan jalinan kerjasama antar pelaku ekonomi serta penyusunan peraturan perundangan tentang mekanisme perijinannya; (3) melakukan evaluasi perkembangan perekonomian terutama komoditas kebu-

tuhan pokok masyarakat kota. Hal ini sejalan dengan Visi Kota Malang yaitu terwujudnya kota malang yang mandiri, berbudaya, sejahtera dan berwawasan lingkungan (Basis Data Kota Malang Tahun 2004 Bidang Ekonomi).

Semua faktor dalam pengembangan ekonomi lokal menjadi perhatian Pemkot Malang termasuk pendampingan langsung, infrastruktur, pelayanan public (termasuk perijinan usaha) dan kebijakan daerah. Untuk pendampingan secara langsung kegiatan yang dilakukan diantaranya: mengadakan pameran, pelatihan dan fasilitasi BDS. Selain itu di Kota Malang ada program P2KP dan PKBL dalam konteks pengembangan ekonomi lokal yang lebih diarahkan pada pengurangan angka pengangguran. Sayangnya, kebijakan ini tidak diimbangi dengan dana stimulan yang bisa memberikan rangsangan terhadap pengembangan ekonomi lokal. Dimana, data dari APBD Tahun Anggaran 2005 memperlihatkan bahwa di sektor belanja publik, sebagian besar atau 78% pengeluaran pengembangan ekonomi adalah untuk pembangunan bidang infarastruktur. Peningkatan sarana infrastruktur tidak hanya jalan tapi juga saluran air yang dilakukan hampir di semua Kelurahan di Kota Malang tahun 2005 sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar. Sedangkan bidang industri dan perdagangan di fokuskan pada pembinaan UKM.

Selain itu, beberapa kelemahan terkait pengembangan ekonomi lokal di Kota Malang adalah tidak merata dan terjangkaunya secara meluas pada wilayah-wilayah ekonomi potensial yang bisa digerakkan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi lokal. Kecenderungan hanya tersentralisasi pada pusat ekonomi tengah kota karena tidak ada kebijakan pemerataan akses pengembangan ekonomi lokal baik dalam akses modal maupun pasar dari kegiatan produksi baik dalam skala makro, mikro, sektoral sampai ru-

mah tangga. Sehingga pengembangan ekonomi lokal mestinya berdampak pada rakyat miskin kota yang ada di pinggir dan sudut kota yang berimplikasi pada pengurangan pengangguran dan penurunan angka kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana gambaran potensi ekonomi yang mempunyai saling keterkaitannya untuk mengembangkan ekonomi kota malang?, (2) Sejauhmana efektivitas kebijakan pemerintah kota Malang dalam membuat strategi dan prioritas pengembangan ekonomi Kota Malang?, dan (3) Bagaimana model pengembangan ekonomi di Kota Malang? Sedangkan tujuan penelitian adalah: (1) Sebagai Pedoman untuk pelaksanaan kegiatan Model Pengembangan Ekonomi di Kota Malang, (2) Mengidentifikasi potensi ekonomi yang saling keterkaitannya untuk pengembangan ekonomi di Kota Malang, (3) Mengetahui potensi pengembangan berdasarkan strategi dan prioritas yang sesuai dengan potensi ekonomi yang ada di Kota Malang, dan (4) Merumuskan model pengembangan ekonomi di Kota Malang

METODE

Proses Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*Maching Methode*), yaitu menggabungkan aspek kuantitatif dan aspek kualitatif.

Awal penelitian ini dilakukan menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang melalui metode *Location Quotient* (LQ) untuk melihat perbandingan besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional. Setelah itu, dilanjutkan dengan analisa input-output (I-O) yang merupakan salah satu metode analisis yang digunakan untuk mengukur per-

ekonomian suatu daerah dengan melihat keterkaitan antar sektor dalam usaha untuk memahami kompleksitas perekonomian daerah.

Setelah melalui tahapan analisa awal diatas maka langkah selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan survei kelapangan secara secara partisipatif kepada objek penelitian dan dilakukan *indept interview* kepada *key informan* berdasarkan sektor-sektor yang potensial dikembangkan. Survei dilakukan tidak hanya untuk mengetahui sumber-sumber dan peta potensi ekonomi lokal Kota Malang berdasarkan data potensi diatas melainkan dengan survei dan *indept interview* yang dilakukan untuk mengungkap kapasitas dan menggali lebih dalam kaitannya untuk mengungkapkan strategi kebijakan dan program pengembangan ekonomi lokal sebagai upaya menemukan model. Data yang dibutuhkan selain data primer, penelitian ini juga membutuhkan data skunder seperti Renstra, KU APBD, APBD, Malang dalam Angka, serta dokumen pendukung lainnya.

Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Malang dimana populasi penelitian adalah usaha-usaha yang bergerak di masing-masing sektor baik Industri besar, usaha kecil menengah baik dalam 9 sektor ekonomi, yaitu: Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri, Bangunan, Angkutan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Lembaga Keuangan dan Jasa Perbankan, serta Jasa-Jasa. Sementara sampel yang pakai dalam model pengembangan ekonomi dengan menggunakan cluster sampel dengan beberapa pertimbangan: (1) Pengembangan ekonomi kota Malang di kategorisasikan di sektor-sektor unggulan yang turut mendukung pengembangan ekonomi kota malang, dan (2) Rata-rata sampel berada di pusat sentra-sentra

tertentu dan mempunyai kesamaan pola usaha.

Tahapan Penelitian dan Model Analisis

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah tertentu.

Nilai tambah bruto meliputi faktor-faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung neto.

Nilai produksi tidak sama dengan nilai tambah karena nilai produksi terdapat biaya antara (*intermediate cost*) yaitu biaya perolehan/pembelian dari sektor lain yang telah dihitung sebagai produksi di sektor lain.

Jadi nilai tambah = nilai produksi – *intermediate cost*

Untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya/riil, maka faktor inflasi harus dikeluarkan dahulu. Pendapatan regional yang didalamnya masih ada unsur inflasi disebut pendapatan regional atas dasar harga yang berlaku. Sedangkan pendapatan regional dengan faktor inflasi sudah ditiadakan merupakan pendapatan regional atas dasar harga konstan, artinya harga produk didasarkan atas harga tahun tertentu. Jadi kenaikan pendapatan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah fisik produksi, karena harga dianggap tetap/konstan.

Location Quotient (LQ)

Location Quotient (LQ) adalah perbandingan besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional. Rumus:

$$LQ = (x_i/PDRB) : (X_i/PDB)$$

Dimana:

- xi : nilai tambah atau pendapatan sektor i di suatu daerah
 PDRB : produk domestik regional bruto daerah tersebut
 Xi : nilai tambah atau pendapatan sektor i secara nasional
 PDB : produk nasional bruto

Bila $LQ > 1$ artinya peranan sektor tersebut di daerah tersebut lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional. Jadi daerah tsb surplus akan produk i dan bisa mengeksportnya ke daerah lain. Daerah itu bisa mengeksport produknya ke daerah lain atau luar negeri karena mampu menghasilkan produk secara lebih murah atau lebih efisien. Dengan kata lain daerah tersebut mempunyai keunggulan komparatif untuk sektor i.

Bila $LQ < 1$ artinya peran sektor i di daerah tersebut lebih kecil dari peranan sektor tersebut secara nasional.

Bila $LQ = 1$ artinya peranan relatif sektor i di suatu daerah sama dengan peranan relatif sektor tersebut secara nasional.

Analisis Input-Output (I-O)

Analisis input output merupakan salah satu metode analisis yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu daerah dengan melihat keterkaitan antar sektor dalam usaha untuk memahami kompleksitas perekonomian daerah tersebut.

Survei Lapangan

Survei lapangan dan *Indept interview* dilakukan untuk mengetahui potensi dan kapasitas pelaku ekonomi di kota Malang. Sebelum survei dilakukan terlebih dahulu peneliti menyusun instrumen survei dan *guide interview* untuk menggali data yang mempermudah jalannya penelitian. Survei lapangan secara partisipatif dilakukan kepada subjek penelitian sekaligus dilak-

ukan *indept interview* kepada *key informan* ketika survei dilakukan yang sebelumnya objek survei sudah diketahui ketika analisa *Local Questions (LQ)* dan dan Analisa *Input-Output (I-O)* yang dapat mengetahui sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan. Survei dilakukan tidak hanya untuk mengetahui sumber-sumber dan peta potensi ekonomi lokal Kota Malang berdasarkan data potensi diatas melainkan dengan survei dan *indept interview* yang dilakukan untuk mengungkap kapasitas dan menggali lebih dalam kaitannya untuk mengungkapkan strategi kebijakan dan program pengembangan ekonomi lokal sebagai upaya menemukan model.

Focus Group Discussion (FGD)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui diskusi bersama oleh beberapa peserta dengan menggunakan tema atau isu tertentu sebagai fokus (Bambang Wicaksono, 2005 dalam Agus Dwiyanto (2005)). Para peserta adalah perwakilan dari berbagai *stakeholders* pelaku ekonomi di kota Malang yang semula terlibat dalam Survei lapangan. Pada kegiatan FGD dilakukan pembahasan secara mendetail dan mendalam dengan menggunakan model konfrontatif. Model konfrontatif adalah pelaksanaan FGD dilakukan bersama peserta yang secara ide, pemikiran dan kepentingan yang saling bertentangan. Pada model ini peserta dari *stakeholders* yang saling bertentangan dihadirkan dalam forum diskusi bersama. Maka FGD menghadirkan subjek penelitian dari subjek survei maupun subjek yang diwawancara. Selain itu peserta bisa dikembangkan dengan menghadirkan pejabat birokrasi, LSM, warga masyarakat, Perguruan Tinggi, DPRD, Wartawan dll. Yang secara bebas untuk menganalisa dan mengkritisi model pengembangan ekonomi kota Malang yang kemudian diambil sebuah

kesepakatan bersama tentang model pengembangan ekonomi Kota Malang.

Seminar dan Lokakarya (Semiloka)

Kegiatan seminar dan lokakarya adalah metode yang dipakai dalam penelitian ini untuk menyampaikan temuan sementara tentang model pengembangan ekonomi di Kota Malang. Disamping menyampaikan temuan sementara penelitian, dalam kegiatan ini diharapkan mendapatkan data dan masukan dari para ahli yang mempunyai kompetensi dibidang ekonomi. Hasil seminar kemudian di lokakaryakan untuk mendapatkan penyempurnaan hasil tentang model pengembangan ekonomi di Kota Malang.

HASIL

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang

PDRB Kota Malang menurut harga berlaku tahun 2004 sebesar Rp. 1.068.473.951.000.000,00 atau meningkat 12,85% dibanding tahun 2003. PDRB tersebut terdiri dari sembilan sector yaitu sector pertanian sebesar 1.372.383.000.000 (0,49%), sector Pertambangan dan Penggalian sebesar 275.350.000.000 (0,1%), sector Industri pengolahan sebesar 102.588.928.000.000 (36,3%), sector listrik, gas dan air bersih sebesar 2.324.198.000.000 (0,82%), sector bangunan sebesar 6.305.539 (2,24%), sector perdagangan hotel dan restoran 85.135.358.000.000 (30,12%), sector angkutan dan akomodasi sebesar 24.401.827.000.000 (8,63%), sector keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 19.541.175.000.000 (6,91%) dan sector jasa-jasa sebesar 40.670.465 (14,39%). Tiga sector penyumbang PDRB terbesar adalah sector industri pengolahan (37,11%), diikuti sector perdagangan, hotel dan restoran (29,92%) dan sector jasa-jasa (11,97%). Sedangkan sector yang sumbangannya terhadap PDRB paling kecil adalah sector pertambangan dan peng-

galian (0,07%). Jumlah tenaga kerja yang bekerja di 9 lapangan usaha utama pada tahun 2004 ada 65515 orang. Sebanyak 34,75% bekerja di sector industri, kemudian 31% di sector perdagangan, 12,23% di sector keuangan dan sisanya sebanyak 22,02% bekerja di 6 sector-sektor lainnya.

Sektor Industri di Kota Malang

Jumlah perusahaan industri di kota Malang sebanyak 220 perusahaan yang terdiri dari 179 perusahaan sedang (*medium industry*) dan 41 perusahaan besar (*large industry*). Berdasar definisi BPS kota Malang, yang dimaksud industri sedang adalah perusahaan industri dengan tenaga kerja antara 20 – 99 orang, sedang industri besar adalah perusahaan industri dengan tenaga kerja lebih dari atau sama dengan 100 orang. Sektor industri kota Malang terdiri dari 17 sub sector industri. Adapun sub sector industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan menyumbang pendapatan tertinggi yaitu sub sector pengolahan tembakau dengan 28 perusahaan. Pada tahun 2004 jumlah tenaga kerja yang bekerja di sub sector industri pengolahan tembakau sebanyak 28378 orang atau 71,36% dari seluruh jumlah tenaga kerja yang bekerja di sector industri. Sementara itu pendapatan dari sub sector ini menyumbang 91,3% dari jumlah pendapatan seluruh sub sector industri. Diikuti oleh subsector industri kendaraan bermotor dengan jumlah tenaga kerja sebesar 15.910.653 dengan jumlah perusahaan 10. dan kontribusi pendapatan yang di sumbang oleh sector ini sebesar 1,05%. Hanya subsector industri pengolahan tembakau yang memberikan kontribusi pendapatan paling besar yaitu sebesar 91,3% sedangkan subsector industri yang lainnya rata-rata menyumbangkan kontribusi pendapatan sebesar 1%. Berdasarkan jumlah perusahaan dari subsector yang ada industri makan dan minum paling banyak mempunyai jumlah perusahaan di-

ikuti dengan subsektor pakaian jadi 31, pengolahan tembakau 28, penerbitan dan percetakan 16%, barang galian bukan logam 14 dan yang lainnya rata-rata kurang dari 10 perusahaan.

Jenis Komoditas Eksport Kota Malang

Salah satu unggulan Kota Malang selain sebagai Kota Pendidikan dan Pariwisata juga merupakan kota perdagangan. Hal ini terbukti dengan besarnya sumbangan PDRB dari sektor perdagangan. Disamping hal tersebut komoditas eksport Kota Malang juga cukup besar. Komoditas yang mempunyai nilai ekspor paling tinggi adalah Gold Chain sebesar 9.499.699,31 diikuti dengan produk lain yang nilainya besar diantaranya Wooden Furniture 7.323.759,99, Leather 4.190.875,68, dan Mesh Traps 1.387.657,97. Sedangkan produk yang lainnya omzetnya relatif kecil yaitu di bawah 1.000.000. Total ekspor Kota Malang tahun 2004 sebesar 23.961.475,77 naik % dari tahun 2003. Sedangkan volume ekspor tahun 2004 sebesar 6.333.092,01 naik % di dibandingkan dengan tahun 2003. Jumlah produk yang di ekspor ada 14 Jenis dengan tiga omzet terbesar adalah Gold Chain, Wooden Furniture, dan Leather. Sedangkan produk yang omzetnya paling kecil adalah kayu olahan, Kerang, dan tapioka. Negara tujuan ekspor dengan 3 omzet terbesar adalah USA dengan nilai 70.445.465,70 diikuti oleh Sigggapore dengan nilai 3.368.123,29 dan diikuti oleh Hongkong dengan nilai 3.201.196,04. sedangkan 3 omzet yang paling kecil adalah kenya dengan nilai 124,80, diikuti oleh Bulgaria dengan nilai 210,00 dan thailand 4.995,00.

Jenis Usaha Rakyat di Kota Malang

Aset terbesar usaha ekonomi rakyat di kota Malang tahun 2005 adalah dari garmen. Jumlah usaha garmen ada 154 dengan total omzet sebesar Rp.15.626.850.000,00. Usaha

garmen ini merata di 5 kecamatan yang ada di kota Malang, yaitu kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, Lowokwaru. Jenis usaha dengan aset terbesar kedua adalah usaha kompor dengan total aset Rp.15.079.000.000,00. Sedangkan yang terbesar ketiga adalah usaha mebel dengan total aset Rp.12.834.183.000,00 yang juga tersebar di 5 kecamatan di kota Malang. Usaha mebel ini menyumbang nilai ekspor sebesar 30% untuk tahun 2004. Adapun negara tujuan ekspor terbesar adalah USA. Jenis usaha yang paling sedikit asetnya adalah usaha tempe dan tahu dengan total aset Rp. 145.747.000,00. Adapun usaha kripik tempe yang sering menjadi oleh-oleh khas kota Malang ternyata hanya beraset Rp. 181.500.000,00.

Paling tidak terdapat 27 Jenis usaha dengan jumlah perusahaan sebanyak 891 perusahaan yang tersebar di 5 Kecamatan Di Kota Malang. Di Kec. Klojen terdapat 22 jenis usaha dan 222 jumlah perusahaan dengan total aset kurang lebih 17,109,451.000. Jenis usaha yang paling banyak di Kec. Klojen adalah garmen sebanyak 61 perusahaan dengan total aset 6.932.100.000, diikuti oleh percetakan sebanyak 43 perusahaan dengan total aset 1.794.153.000, diikuti oleh mebel sebanyak 21 perusahaan dengan total aset 3.742.200.000 dan perusahaan roti/kue kering sebanyak 18 perusahaan dengan total aset 284.595.000. Sedangkan sisanya rata-rata kurang dari 10 perusahaan yang terbagi menjadi 18 Jenis usaha. Di Kec.Klojen tidak terdapat usaha kripik tempe, kompor, souvenir, dan logam&emas. Kalau di Kecamatan ini mau di kembangkan menjadi sentra industri maka yang harus di kembangkan adalah yang jenis usahanya paling banyak yaitu garmen dan percetakan.

Di Kec. Sukun terdapat 21 jenis usaha dan 178 jumlah perusahaan dengan total aset kurang lebih 13.877.472.000. Jenis usaha yang paling banyak di Kec. Sukun adalah

garmen sebanyak 31 perusahaan dengan total aset 2.166.000.000, diikuti oleh kulit/sepatu/sandal sebanyak 17 perusahaan dengan total aset 973.000.000, diikuti oleh percetakan sebanyak 14 perusahaan dengan total aset 1.404.255.000 dan perusahaan souvenir sebanyak 14 perusahaan dengan total aset 406.000.000, dan genteng dan tegel sebanyak 13 perusahaan dengan total aset sebanyak 1.755.000.000. Sedangkan sisanya rata-rata kurang dari 10 perusahaan yang terbagi menjadi 15 Jenis usaha. Di Kec.Sukun tidak terdapat usaha ice cream, keripik tempe, dendeng, keramik dan gabah, logam&emas dan sangkar burung. Kalau di Kecamatan ini mau di kembangkan menjadi sentra industri maka yang harus di kembangkan adalah yang jenis usahanya paling banyak yaitu garmen, kulit/sepatu/sandal, percetakan dan genteng dan tegel. Berhubung jenis usaha garmen dan percetakan di Kec.Klojen lebih besar maka Kec. Sukun seharusnya menjadi sentra yang belum di punyai di Kec. lainnya yaitu genteng dan tegel serta usaha kulit/sepatu/sandal.

Sementara itu Di Kec. Kedungkandang terdapat 18 jenis usaha dan 84 jumlah perusahaan dengan total aset kurang lebih 6.310.625.000. Jenis usaha yang paling banyak di Kec. Kedungkandang adalah logam dan emas sebanyak 15 perusahaan dengan total aset 3.004.875.000, diikuti oleh mebel sebanyak 11 perusahaan dengan total aset 602.000.000, dan perusahaan roti/kue kering sebanyak 10 perusahaan dengan total aset 257.375.000. Sedangkan sisanya rata-rata kurang dari 10 perusahaan yang terbagi menjadi 15 Jenis usaha. Di Kec.Kedungkandang tidak terdapat usaha Kerupuk dan Keripik, keripik tempe, kompor, plastik, kulit/sepatu/sandal, shutul cocks, keramik dan gabah, sanyter dan sangkar burung. Kalau di Kecamatan ini mau di kembangkan menjadi sentra industri maka yang harus di kembangkan adalah yang jenis usahanya paling banyak

yang belum di kembangkan dikecamatan lain yaitu logam dan emas.

Sedangkan Di Kec. Blimbing terdapat 21 jenis usaha dan 196 jumlah perusahaan dengan total aset kurang lebih 15.306.048.000. Jenis usaha yang paling banyak di Kec. Blimbing adalah Mebel sebanyak 34 perusahaan dengan total aset 5.602.183.000, diikuti oleh keripik tempe sebanyak 27 perusahaan dengan total aset 141.500.000, Sedangkan sisanya rata-rata bergerak di bidang lain yang terbagi menjadi 19 Jenis usaha. Di Kec.Blimbing tidak terdapat usaha mie dan soun, ice cream, saus dan kecap, kompor, keramik dan gabah, dan sangkar burung. Kalau di Kecamatan ini mau di kembangkan menjadi sentra industri maka yang harus di kembangkan adalah yang jenis usahanya paling banyak dan yang belum dikembangkan di Kec.lain yaitu mebel dan keripik tempe.

Terakhir adalah Kec. Lowokwaru terdapat 17 jenis usaha dan 211 jumlah perusahaan dengan total aset kurang lebih 24.459.719.000. Jenis usaha yang paling banyak di Kec. Lowokwaru adalah perusahaan keramik dan gabah sebanyak 41 perusahaan dengan total aset 2.157.000.000, kompor sebanyak 35 perusahaan dengan total aset 15.019.000.000, dan garmen sebanyak 34 perusahaan dengan total aset 2.494.500.000, Sedangkan sisanya rata-rata kurang dari 10 perusahaan yang terbagi menjadi 14 Jenis usaha. Di Kec.lowokwaru tidak terdapat usaha krupuk dan keripik, mie soun, dendeng, tempe dan tahu, bumbu, kulit/sepatu dan sandal, logam & emas dan sangkar burung. Kalau di Kecamatan ini mau di kembangkan menjadi sentra industri maka yang harus di kembangkan adalah yang jenis usahanya paling banyak dan belum dikembangkan di Kec.Lainnya yaitu keramik dan gabah serta kompor. Lebih lengkap lihat Tabel Jenis Usaha Ekonomi Rakyat Kota Malang 2005.

PEMBAHASAN

Dari hasil analisis LQ diketahui bahwa pada tahun 2001 maupun tahun 2005 ada 5 sektor yang nilainya LQnya di atas 1 yaitu sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel, restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan dan sewa serta sektor jasa-jasa. $LQ > 1$ berarti bahwa peranan kelima sektor tersebut di kota Malang lebih menonjol daripada peran kelima sektor tersebut di Jawa Timur. $LQ > 1$ menunjukkan bahwa kota Malang surplus akan produk lima sektor di atas dan dapat mengeksport produknya ke daerah lain atau ke luar negeri. Hal ini hanya mungkin terjadi karena kota Malang mampu menghasilkan produk secara lebih murah atau lebih efisien. Dengan kata lain kota Malang memiliki keunggulan komparatif akan produk lima sektor tersebut di atas.

Faktor-faktor yang menyebabkan kota Malang memiliki keunggulan komparatif:

- Pemberian alam, seperti pemandangan yang indah dan udara sejuk sehingga mendukung kota Malang sebagai kota wisata. Predikat sebagai kota wisata ini menyebabkan berkembangnya sektor perdagangan, hotel dan restoran.
- Masyarakat memiliki ketrampilan khusus, misalnya membuat keramik dan kripik tempe sehingga mendorong pertumbuhan industri di kota Malang. Dengan adanya sentra keramik di Dinoyo dan kripik tempe di Sanan bisa menjamin adanya barang dalam kualitas dan kuantitas yang diinginkan dan ini bisa menurunkan biaya transportasi/biaya pemasaran.
- Tenaga kerja tersedia dalam jumlah yang cukup serta didukung ketrampilan yang memadai.
- Predikat kota Malang sebagai kota pendidikan mendukung perkembangan sektor perdagangan, pengangkutan dan komunikasi.

Nilai LQ yang lebih dari 1 untuk kelima sektor di atas dimungkinkan karena predikat kota Malang sebagai kota industri, pariwisata dan pendidikan. Ketiga predikat tadi saling terkait satu sama lain sehingga sektor industri, pengangkutan, komunikasi, keuangan, sewa bangunan dan jasa berkembang bersama-sama.

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan kontribusi sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan dan sewa bangunan; dan sektor jasa terhadap PDRB di kota Malang dan Jawa Timur pada tahun 2005.

Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa ada 4 sektor dengan LQ kurang dari 1, yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas dan air serta sektor konstruksi. $LQ < 1$ berarti bahwa peranan keempat sektor tersebut di kota Malang lebih kecil daripada peranan sektor-sektor tersebut di tingkat Jawa Timur.

Perbandingan peranan sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, air dan gas; serta sektor konstruksi terhadap PDRB kota Malang dan Jawa Timur pada tahun 2005, ternyata kontribusi keempat sektor tersebut terhadap perekonomian kota Malang lebih kecil dibanding kontribusinya terhadap perekonomian Jawa Timur. Data ini mendukung hasil perhitungan LQ keempat sektor yang lebih kecil dari 1.

Antara tahun 2001 ke tahun 2005 ada 4 sektor yang LQnya naik yaitu sektor pertanian; sektor industri pengolahan; sektor konstruksi; dan sektor keuangan. Adapun 5 sektor lainnya LQnya turun, yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, air dan gas; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; dan sektor jasa-jasa.

Sektor pertanian LQnya kurang dari 1 namun LQ tersebut naik sedikit dari tahun

2001 ke tahun 2005. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB kota Malang pada tahun 2001 sebesar 0,56% dan tahun 2005 meningkat sedikit menjadi 0,58%. Meskipun lahan pertanian di kota Malang sudah berkurang karena banyak lahan yang beralih fungsi menjadi ruko ataupun perumahan, namun peran sektor pertanian tetap penting dalam pembangunan sektor industri di kota Malang.

Sektor pertambangan dan penggalan LQnya kurang dari 1 dan menurun dari tahun 2001 ke tahun 2005. Hal ini disebabkan sangat kecilnya kontribusi pertambangan terhadap PDRB, sedangkan kontribusi penggalan juga semakin menurun. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan terhadap PDRB di tahun 2001 sebesar 0,106%, sedangkan di tahun 2005 menurun menjadi 0,086%.

Sektor industri pengolahan LQnya lebih dari 1 dan mengalami kenaikan dari tahun 2001 ke tahun 2005. Hal ini terkait dengan salah satu fungsi kota Malang sebagai kota Industri. Kontribusi sektor industri disumbang sebagian besar (36%) dari subsektor industri makanan, minuman dan pengolahan tembakau (rokok). Kontribusi subsektor pengolahan tembakau terhadap PDRB besar karena kota Malang merupakan salah satu produsen rokok terbesar di Jawa Timur setelah Kediri dan Surabaya. Sedangkan dari total penerimaan sektor industri selama tahun 2005, subsektor pengolahan tembakau (rokok) menyumbang sebesar Rp.5,42 milyar atau sekitar 90% (Basis data kota Malang, 2005)

Sektor listrik, air dan gas LQnya kurang dari 1 dan menurun dari tahun 2001 ke tahun 2005. Kontribusi sektor listrik, air dan gas terhadap PDRB kota Malang di tahun 2001 sebesar 0,85% dan di tahun 2005 menurun menjadi 0,53%.

Sektor konstruksi LQnya kurang dari 1 dan naik dari tahun 2001 ke tahun 2005.

Kontribusi sektor konstruksi terhadap PDRB kota Malang naik dari 2,15% di tahun 2001 menjadi 2,9% di tahun 2005. Hal ini dapat terlihat dari berbagai aktivitas pembangunan fisik yang melaju pesat.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran LQnya lebih dari 1 tetapi menurun dari tahun 2001 ke tahun 2005. Meskipun kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB besar, tetapi karena kondisi ekonomi yang belum pulih dari krisis ekonomi sejak tahun 1987 sehingga sektor riil terpengaruh, dalam hal ini tingkat perdagangan menurun, tingkat hunian hotel turun dan konsumen restoran juga turun pula. Tingkat hunian hotel turun selain karena daya beli masyarakat turun, juga karena terangkapnya DR. Azahari di Batu, sehingga merusak citra Malang sebagai kota wisata, sehingga wisatawan yang berkunjung ke Malang menurun.

Sektor pengangkutan dan komunikasi LQnya lebih dari 1 namun turun dari tahun 2001 ke tahun 2005. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB menurun dari 8,7% di tahun 2001 menjadi sebesar 7,5% di tahun 2005.

Sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan LQnya di atas 1 dan naik dari tahun 2001 ke tahun 2005. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB kota Malang naik dari 6,8% di tahun 2001 menjadi sebesar 8,5% di tahun 2005. Hal ini karena semakin meningkatnya peran bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai lembaga pembiayaan maupun investasi, apalagi akhir-akhir ini semakin pesat pula perkembangan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah. Sewa bangunan seperti pertokoan dan perkantoran juga meningkat dengan semakin meningkatnya peran kota Malang sebagai kota industri.

Sektor jasa-jasa LQnya di atas 1 tapi menurun dari tahun 2001 ke tahun 2005. Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB kota Malang turun sedikit dari 14,5% di ta-

hun 2001 menjadi 14,4% di tahun 2005. Hal ini karena turunnya peran jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan jasa perorangan. Jasa sosial kemasyarakatan seperti pendidikan menurun karena banyak anak putus sekolah karena ketiadaan biaya. Jasa hiburan seperti bioskop dan taman hiburan menurun pengunjungnya karena masyarakat lebih suka menikmati hiburan di rumah seperti menonton televisi atau mendengarkan radio, sehingga bisa menghemat pengeluaran.

Proportional Share untuk sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa-jasa negative artinya pertumbuhan kelima sektor tersebut di tingkat Jawa Timur lambat atau bahkan sedang merosot. Sedangkan untuk sektor listrik, perdagangan, angkutan dan keuangan positif artinya pertumbuhan keempat sektor tersebut di Jawa Timur cepat.

Differential Share (Ds) positif semua, berarti daya saing semua sektor di kota Malang lebih tinggi daripada daya saing sektor-sektor tersebut di Jawa Timur. Hal ini terjadi karena kota Malang memiliki keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah/efisien, kondisi alam yang mendukung serta kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kota Malang sebagai kota industri, pariwisata dan pendidikan sesuai Tri Bina Cita.

Hasil Analisis IO (Input Output)

Dalam penentuan sub sektorkunci pembangunan dilakukan analisis terhadap table input output dengan menentukan tingkat dampak keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan dampak keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dari masing-masing aktivitas produksi. Suatu aktivitas produksi dikatakan memiliki tingkat dampak keterkaitan ke belakang dan tingkat dampak keterkaitan ke depan yang tinggi apabila nilai keduanya lebih dari 1, dan dikatakan rendah bila nilainya kurang dari 1.

Aktivitas produksi yang mempunyai tingkat dampak keterkaitan ke depan yang tinggi memberikan indikasi bahwa aktivitas produksi tersebut mempunyai *daya dorong* yang cukup kuat dibandingkan aktivitas produksi lainnya. Sedangkan aktivitas produksi yang mempunyai tingkat dampak keterkaitan ke belakang yang tinggi berarti bahwa aktivitas produksi tersebut mempunyai *ketergantungan* yang tinggi terhadap aktivitas produksi lain.

Pada hakekatnya subsektor kunci pembangunan merupakan subsektor yang diharapkan dapat menghidupkan sector-sektor lainnya, baik sector pendukung input maupun sector pengguna outputnya. Subsektor ini diharapkan juga mampu mendorong sector lain untuk membuat diversifikasi produk dengan anggota subsektor ini sebagai bahan bakunya. Oleh karena itu, subsektor kunci merupakan subsektor yang harus memiliki keduanya, baik dampak keterkaitan ke belakang maupun dampak keterkaitan ke depan yang tinggi.

Untuk menentukan sub sektor kunci, maka dilakukan pengelompokan terhadap nilai keterkaitan dari masing-masing aktivitas produksi. Aktivitas produksi dikelompokkan menjadi empat kuadran. Aktivitas produksi yang menempati posisi kuadran I memiliki nilai keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan yang tinggi. Aktivitas produksi ini merupakan aktivitas produksi unggulan yang nantinya bisa menjadi kunci pembangunan.

Aktivitas produksi yang terdapat pada kuadran II merupakan aktivitas produksi potensial. Pada kuadran II ini nilai dampak keterkaitan ke depan tinggi, tetapi dampak keterkaitan ke belakang rendah. Aktivitas produksi pada kuadran III merupakan aktivitas produksi yang terbelakang karena memiliki nilai dampak keterkaitan ke depan dan dampak keterkaitan ke belakang yang rendah. Aktivitas produksi pada kuadran IV

merupakan aktivitas produksi yang sedang berkembang dimana tingkat dampak keterkaitan ke belakang rendah, tetapi dampak keterkaitan ke depan tinggi.

Keterkaitan Ke Depan (*Forward Linkage*)

Sebagaimana prasyarat dalam perhitungan tingkat dampak keterkaitan ke belakang dan tingkat dampak keterkaitan ke depan, maka aktivitas produksi yang memiliki hasil lebih besar dari 1 diidentifikasi sebagai aktivitas produksi unggulan. *Forward linkage* (dampak keterkaitan ke depan) juga disebut *derajat kepekaan/daya mendorong* karena sifatnya hanya mendorong tumbuhnya sektor-sektor hilir karena meningkatnya input yang disediakan sektor hulu. Suatu sektor yang mempunyai derajat kepekaan yang tinggi memberikan indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai daya dorong yang cukup kuat dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Dari tabel input output seratus subsektor (100X100) yang disusun berdasar data PDRB kota Malang tahun 2004, terdapat 29 aktivitas produksi dari 9 sektor usaha dengan keterkaitan ke depan yang melampaui kriteria tersebut. Sektor pertanian terdiri dari 34 aktivitas produksi, dan 7 di antaranya memiliki keterkaitan ke depan lebih dari 1 yaitu padi; jagung; tebu; tanaman perkebunan lain; pemotongan hewan; unggas dan perikanan darat lainnya. Dengan demikian 7 aktivitas produksi tersebut bisa diandalkan (memenuhi kriteria sebagai aktivitas produksi unggulan) karena memiliki keterkaitan sektoral yang tinggi berdasar tingkat keterkaitan ke depannya.

Sektor pertambangan dan penggalian terdiri dari 4 aktivitas produksi dimana 3 diantaranya memenuhi kriteria sebagai unggulan karena tingkat dampak keterkaitan ke depannya lebih dari 1. Ketiga aktivitas produksi tersebut adalah minyak bumi; gas bumi dan penggalian. Dengan demikian ketiga aktivitas produksi tersebut berperan aktif

untuk menyumbang input bagi aktivitas produksi sektor lain.

Sektor industri pengolahan terdiri dari 30 aktivitas produksi dimana 13 diantaranya memenuhi kriteria unggulan dilihat dari tingkat dampak keterkaitan ke depan yang tinggi yaitu, industri penggilingan padi; industri tepung segala jenis; industri pengolahan dan penyamakan barang dari kulit; industri bambu, kayu dan rotan; industri kertas; industri barang-barang dari kertas dan karton; industri pupuk dan pestisida; industri kimia lainnya; industri pengilangan minyak, industri barang karet dan plastik; industri barang dari logam; industri mesin serta industri kapal dan perbaikannya. Jadi ketigabelas aktivitas produksi tersebut berperan aktif dalam menyumbang input untuk aktivitas produksi sektor lain sehingga bisa menjadi sektor unggulan.

Sektor listrik, gas dan air bersih terdiri dari 3 aktivitas produksi dengan 1 aktivitas produksi unggulan yaitu listrik. Sektor bangunan dan konstruksi memiliki tingkat dampak keterkaitan ke depan kurang dari 1 jadi tidak termasuk sektor unggulan.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran terdiri dari 3 aktivitas produksi dengan 1 aktivitas produksi unggulan yaitu hotel. Dengan demikian hotel merupakan aktivitas produksi yang berperan aktif menyumbang input untuk aktivitas produksi sektor lain.

Sektor angkutan dan komunikasi terdiri dari 11 aktivitas produksi dengan 2 aktivitas produksi unggulan yaitu truk dan telekomunikasi. Sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan terdiri dari 8 aktivitas produksi, dan hanya 1 diantaranya yang memiliki tingkat dampak keterkaitan ke depan lebih dari 1 yaitu bank dan lembaga keuangan. Sektor jasa-jasa terdiri dari 6 aktivitas produksi dimana hanya 1 aktivitas produksi dengan dampak keterkaitan ke depan lebih dari 1 yaitu jasa perorangan dan rumah tangga. Jasa perorangan dan rumah tangga ini

meliputi tukang cukur, tukang jahit, binatu, salon, pembantu rumah tangga, pengasuh bayi dan sebagainya.

Keterkaitan Ke Belakang (*Backward Linkage*)

Tingkat dampak keterkaitan ke belakang/*backward linkage* disebut juga *daya menarik/daya penyebaran*. Sektor yang memiliki tingkat backward linkage yang tinggi berarti sektor tersebut mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sektor lain. Dari 100 aktivitas produksi yang meliputi 9 sektor usaha, terdapat 40 aktivitas produksi yang memiliki tingkat dampak keterkaitan ke belakang lebih dari 1. Pada sektor pertanian terdapat 4 aktivitas produksi unggulan dilihat dari tingkat dampak keterkaitan ke belakang, yaitu teh; pemotongan hewan; telur serta aktivitas produksi pengeringan dan penggaraman. Sektor pertambangan dan penggalian tidak memiliki 1 aktivitas produksi pun yang memiliki tingkat dampak keterkaitan ke belakang yang tinggi. Berarti sektor ini belum mampu menjadi sektor unggulan karena tingkat dampak keterkaitan ke belakangnya belum mencapai lebih dari 1.

Sektor industri pengolahan memiliki 25 aktivitas produksi yang tingkat dampak keterkaitan ke belakang tinggi. Berarti sektor industri pengolahan ini berperan penting dalam menyerap input. Sektor listrik, gas dan air bersih memiliki 2 aktivitas produksi yang tingkat dampak keterkaitan ke belakangnya lebih dari 1 yaitu listrik dan air bersih.

Sektor konstruksi dan bangunan memiliki tingkat dampak keterkaitan ke belakang lebih dari 1. Jadi sektor konstruksi dan bangunan berperan penting untuk menyerap input.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki 2 aktivitas produksi yang tingkat keterkaitan ke belakangnya tinggi yaitu

hotel dan restoran. Hotel selain memiliki tingkat dampak keterkaitan ke belakang yang tinggi juga memiliki tingkat dampak keterkaitan ke depan yang tinggi pula. Dengan demikian hotel merupakan aktivitas produksi unggulan.

Sektor angkutan dan komunikasi memiliki 2 aktivitas produksi yang tingkat keterkaitan ke belakangnya tinggi yaitu angkutan kereta api dan bus. Sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan memiliki 3 aktivitas produksi dengan tingkat dampak keterkaitan ke belakang yang lebih dari 1, yaitu bank dan lembaga keuangan; pasar modal dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor jasa-jasa hanya memiliki 1 aktivitas produksi dengan tingkat dampak keterkaitan ke belakang yang tinggi yaitu jasa kemasyarakatan lainnya. Jasa kemasyarakatan lainnya ini meliputi jasa pendidikan, kesehatan, riset, palang merah, panti asuhan, panti wreda, rumah ibadah dan sebagainya.

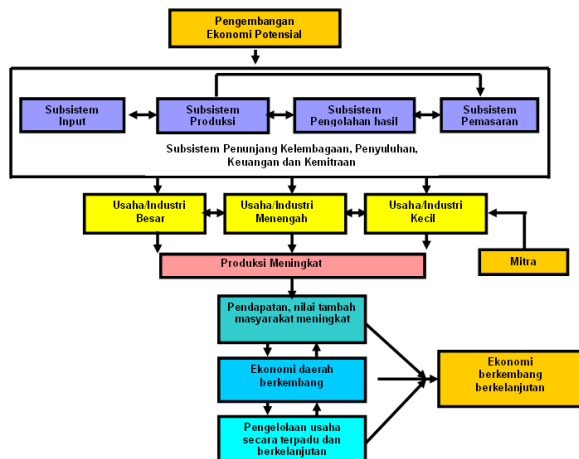
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Model Pengembangan Ekonomi Kota Malang Sektor Potensial Berdasarkan hasil analisa Input Output sebagaimana yang tergambar pada *Forward* dan *Backward Linkage* Aktivitas Ekonomi Kota Malang diatas berada pada Kuadran II dengan aktivitas produksi antara lain: Industri barang dari logam, Padi, Tanaman perkebunan lain, Jagung, Truk, Tebu, Minyak bumi, Gas bumi, perdagangan, Unggas, Telekomunikasi, Penggalian, Perikanan darat lainnya, Jasa Perorangan dan rumah tangga.

Kota Malang dengan ikonnya sebagai kota industri dan perdagangan memang tidak salah jika aktivitas perdagangan merupakan sektor potensial. Tentang komoditi yang kemungkinan berpeluang untuk dapat secara aktif diperdagangkan pada pasar regional/global yang kompetitif tersebut, tampaknya tidak ada pilihan, kecuali yang

mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantages*). Komoditi tersebut terutama berasal dari sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan dan subsektor peternakan serta sektor industri khususnya subsektor industri pengolahan dan industri kecil.



Gambar 1 Model Pengembangan Ekonomi Sektor Potensial

Kemudian kualifikasi usaha yang mempunyai peluang untuk dapat mengembangkan usahanya sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian di daerah adalah kegiatan usaha yang mempunyai pengalaman/catatan (*track record*) yang baik terutama selama sepuluh tahun terakhir dan sektor perdagangan memang menjadi motor dan penggerak perekonomian di Kota Malang. Selanjutnya atas dasar pengalaman terutama di masa krisis delapan tahun terakhir, pilihan untuk memprioritaskan kegiatan usaha perdagangan baik dalam skala usaha kecil dan menengah adalah merupakan pilihan yang cukup bijaksana karena dianggap mempunyai potensi. Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana mencermati kemungkinan yang akan terjadi dalam kegiatan ekonomi lokal, regional dan nasional melalui sektor perdagangan dan berpeluang untuk dapat dikembangkan kegiatan usahanya pada pasar yang kompetitif, sehingga

disamping dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas usahanya juga dapat menopang secara kuat perekonomian di daerah.

Saran

Model pengembangan tersebut di atas perlu ditindak lanjuti karena jika dicermati lebih detail lagi segala usaha dan aktivitas perekonomian di Kota Malang lebih banyak didominasi di sektor perdagangan. Karena, Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur yang mampu menyediakan berbagai fasilitas dan sarana kepada masyarakat baik penduduk asli maupun pendatang. Kota Malang merupakan kota yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi orang-orang diluar Malang untuk menanamkan investasinya baik di sektor perdagangan, industri, jasa pendidikan, maupun keuangan. Hal ini disebabkan karena ramainya Kota Malang dan banyaknya masyarakat yang membutuhkan layanan. Maka tidak salah jika investor menanamkan investasinya di Kota Malang.

DAFTAR RUJUKAN

- Todaro. M. 1989. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Cullis. J. and P. Jones. 1992. *Public Finance and Public Choice Analytical Perspectives*. London: Mc Graw-Hill Book Co.
- di Musgrave. R. A.. P.B. Musgrave. 1989. *Public Finance in Theory and Practice* 3th ed. New York. USA: Mc Graw-Hill Book Co.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Syahrir. 1995. *Meramal Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Glasson John. 1997. *Regional Development*. Hutchinson of London
- Maliza and Feser. 1999. *Understanding Local Economic Development*. New Jersey: Center for Urban Policy Research.

- Birgit Kerstan. 2004. *Bali Post*. 5 Agustus 2004. halaman 10.
- GTZ Local Economic Development Position Paper. 2004. *Draft 2004: What makes LED LED?*
- A.H.J. Helmsing. 2001. Local economic development: new generations of actors. policies and instruments. *Draft paper for the 2001 Cape Town Symposium*.
- LPPEM UI. 2003. *Pengembangan Ekonomi Lokal*. Modul Diklat JFPP. Jakarta: Bappenas-LPEM UI.
- Bambang Wicaksono. Diskusi Kelompok Terarah dalam Agus Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Japan Internasional Corporate Agency (JICA) dan Gadjah Mada University Press.